

## ***Abstract***

*After 10 years of taking responsibility for tackling Sidoarjo mud, in 2017 BPLS was officially dissolved. Considering the continued mudflow, the BPLS task is then transferred to PPLS. However, PPLS has different tasks; they were assigned to control the mud, not to tackle the mudflow as did BPLS. Public relations activities are used to inform the public about this transition. PPLS Public Relations carry out this task until the end of 2017. This study aims to identify objectives and mapping PPLS public relations activities during the transitional period. Qualitative case study is the method used in this study. In the transition period, public relations activities are not done in a structured way. Public relations objectives are not formulated through research, but are based on routines and regulations. Management stages are just routines and are not adopted as mechanisms for defining problems and making solutions. Stages of management are also not based on research. There is no specific strategy that guides the public relations activity. The initial desire to introduce the different tasks of the new institution (from "tackling" to "controlling") is not executed strategically. Thus, the communication aspect is ignored in post-disaster management by PPLS, especially during the transitional period. The false perspective of looking at the urgency of public relations appears to be the reason for the poor public relations activity: public relations activity is just a matter of talking to external parties.*

**Keywords:** *government public relations, Sidoarjo mud, PPLS, post-disaster communication*

## **Abstrak**

Setelah 10 tahun mengemban tanggung jawab menanggulangi lumpur Sidoarjo, pada tahun 2017 BPLS secara resmi dibubarkan. Mempertimbangkan semburan lumpur yang masih terus terjadi, tugas BPLS kemudian dialihkan kepada PPLS. Namun, PPLS memiliki tugas yang berbeda; mereka ditugaskan untuk mengendalikan lumpur, bukan menanggulangi lumpur seperti yang dilakukan BPLS. Aktivitas humas dimanfaatkan untuk menginformasikan kepada publik tentang peralihan ini. Humas PPLS menjadi pihak yang mengemban tugas ini hingga akhir 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan dan memetakan aktivitas humas PPLS selama masa peralihan. Studi kasus kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam masa peralihan, aktivitas humas tidak dilakukan secara terstruktur. Tujuan humas tidak diformulasikan melalui riset, namun didasarkan pada rutinitas dan regulasi. Tahapan manajemen hanya sebagai rutinitas dan tidak diadopsi sebagai mekanisme untuk mendefinisi masalah dan membuat solusi. Tahapan manajemen yang dilakukan juga tidak dilandaskan pada riset. Tidak ada strategi spesifik yang memandu aktivitas humas. Keinginan awal untuk mengenalkan perbedaan tugas dari lembaga baru (dari “menanggulangi” menjadi “mengendalikan”) tidak dieksekusi secara strategis. Jadi, aspek komunikasi diabaikan dalam manajemen pasca-bencana yang dilakukan PPLS, khususnya pada masa peralihan. Perspektif yang keliru dalam memandang urgensi humas nampak sebagai alasan buruknya aktivitas humas ini: aktivitas humas hanya soal berbicara kepada pihak eksternal.

**Kata kunci:** humas pemerintah, lumpur Sidoarjo, PPLS, komunikasi pasca-bencana